

# ANALISIS HIERARKI PUSAT PELAYAN DI KOTA KUPANG

Poppy Haryani<sup>1</sup>, Martina Ayu Sejati<sup>2</sup>, Tugma Jaya Manalu<sup>3</sup>, Febriyanti  
Angelia Ginting<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Nusa Cendana Kupang

<sup>4</sup>Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Proklamasi 45

poppy\_haryani@staf.undana.ac.id

Artikel Info : diterima 20/05/2025, revisi 30/05/2025, publish 12/06/2025

## ABSTRACT

*With Kupang City's subdistricts serving as the analysis unit, this study seeks to determine the hierarchy of service centers. The hierarchy level of service centers is ascertained by the use of centrality indices and scalogram techniques. The results are presented in a hierarchy table based on the presence and completeness of service facilities in each area. In Kupang City, Hierarchy I includes the Oebobo and Maulafa subdistricts, which have more complete facilities and infrastructure and function as primary service centers with significant influence on surrounding areas. Hierarchy II consists of the Alak and Kelapa Lima subdistricts, which, although having more facilities, are not as comprehensive as Oebobo and Maulafa, with lower service quality. Meanwhile, the Kota Raja and Kota Lama subdistricts are in Hierarchy III, with more limited facilities and functioning as local service centers with lower accessibility. The results of this study are expected to provide insights for the local government in planning related to service centers.*

**Keywords:** hierarchy, service center, scalogram analysis, centrality index, Kupang City.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hierarki pusat pelayanan dengan unit analisis kecamatan di Kota Kupang. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik skalogram dan indeks sentralitas untuk menentukan tingkat hierarki pusat pelayanan. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk tabel hierarki berdasarkan keberadaan dan kelengkapan fasilitas pelayanan di masing-masing wilayah. Di Kota Kupang, Hierarki I meliputi Kecamatan Oebobo dan Maulafa yang memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lebih lengkap serta berfungsi sebagai pusat pelayanan utama dengan pengaruh signifikan terhadap wilayah sekitarnya. Hierarki II terdiri dari Kecamatan Alak dan Kelapa Lima, yang meskipun memiliki fasilitas lebih banyak, tidak sekomprehensif Kecamatan Oebobo dan Maulafa, dengan kualitas pelayanan yang lebih rendah. Sedangkan, Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama berada pada Hierarki III, dengan fasilitas yang lebih terbatas dan berfungsi sebagai pusat layanan lokal dengan aksesibilitas yang lebih rendah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan terkait pusat pelayanan.

**Kata kunci:** hierarki, pusat pelayanan, analisis skalogram, indeks sentralitas, Kota Kupang.

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan daerah perkotaan di Indonesia menggambarkan pola ekspansi yang dipercepat, yang mencakup peningkatan demografis dan keterlibatan sosial ekonomi. Terjadinya urbanisasi ini telah mengharuskan penyediaan layanan publik yang memadai, yang meliputi lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, perusahaan komersial, dan sistem transportasi. Akibatnya, perencanaan tata ruang mengasumsikan fungsi penting dalam menjamin kemanjuran, efektivitas biaya, dan distribusi layanan yang adil kepada penduduk. Perencanaan yang efektif harus mempertimbangkan tantangan yang dihadapi oleh kota-kota, seperti masalah transportasi dan permukiman kumuh, yang semakin meningkat seiring dengan urbanisasi (Darmawan & Suripin, 2014).

Salah satu pendekatan penting dalam perencanaan wilayah adalah penentuan hierarki pusat pelayanan. Hierarki ini membantu dalam mengorganisir dan mendistribusikan sumber daya secara efisien, memastikan bahwa setiap area perkotaan memiliki akses yang memadai terhadap layanan yang diperlukan untuk mendukung kualitas hidup yang baik. (Tjiptoherijanto, 2016) Pentingnya penerapan hierarki pusat pelayanan ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk mengurangi kesenjangan dalam akses layanan di berbagai wilayah perkotaan.

Melalui pendekatan hierarki wilayah, pemerintah dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih efisien, mengingat adanya perbedaan kebutuhan dan potensi di setiap tingkat wilayah. Dalam menentukan hirarki wilayah, jumlah penduduk dan ketersediaan fasilitas pelayanan menjadi faktor utama yang menentukan posisi suatu wilayah. (Urban Indonesia, 2022). Ketersediaan fasilitas pelayanan yang memadai akan sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan. Ketersediaan fasilitas pelayanan yang baik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di daerah perkotaan, menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Namun, pada kenyataannya, banyak kota di Indonesia masih menghadapi ketimpangan dalam distribusi pusat pelayanan. Implementasi hierarki pusat pelayanan yang efektif dapat membantu mengatasi masalah permukiman kumuh dan meningkatkan kualitas hidup penduduk kota-kota di Indonesia (Lasaiba, 2022).

Selain itu, perencanaan yang baik akan mengurangi dampak negatif dari urbanisasi, seperti kemacetan dan penurunan kualitas lingkungan (Darmawan & Suripin, 2014). Konsentrasi kegiatan dan fasilitas umumnya terfokus di kawasan pusat kota, sehingga menciptakan beban wilayah yang berlebihan dan memperluas kesenjangan antarwilayah. Daerah pinggiran sering kali mengalami kekurangan fasilitas atau akses yang terbatas terhadap layanan dasar.

Kondisi tersebut juga dialami oleh Kota Kupang, sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kota ini mengalami pertumbuhan wilayah dan penduduk yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan layanan publik di wilayah timur Indonesia, Kota Kupang memiliki tantangan besar dalam mengelola penyediaan fasilitas secara merata. Dalam konteks ini, penting untuk menerapkan strategi perencanaan yang terintegrasi guna memastikan distribusi layanan yang lebih adil dan efisien di seluruh wilayah, termasuk daerah pinggiran. Strategi ini harus mencakup pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, sehingga semua penduduk, termasuk yang tinggal di daerah pinggiran, dapat mengakses layanan publik dengan lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pendekatan hierarki wilayah dan indeks sentralitas di Kota Kupang. Pendekatan ini akan memungkinkan identifikasi pusat-pusat pelayanan yang optimal dan membantu merencanakan distribusi sumber daya yang lebih merata di seluruh kota. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan akses layanan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kota Kupang. (Syaodih, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan hierarki pusat pelayanan di Kota Kupang berdasarkan berbagai indikator yang relevan, dalam hal ini keberadaan fasilitas pelayanan umum. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret untuk perbaikan distribusi layanan publik dan peningkatan kualitas hidup di Kota Kupang.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan metode analisis scalogram dan indeks sentralitas. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kupang tahun 2024 serta data statistik dari enam kecamatan di Kota Kupang. Selain itu, literatur ilmiah serta informasi tertulis dari internet maupun instansi terkait turut digunakan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: (1) data fasilitas pelayanan umum, (2) data jumlah penduduk, dan (3) infrastruktur jalan. Data fasilitas pelayanan umum mencakup fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Kupang. Sementara itu, data jumlah penduduk di masing-masing kecamatan digunakan untuk menganalisis distribusi dan kepadatan penduduk sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan pusat pelayanan. Adapun data jarak antar kecamatan dikumpulkan untuk mengevaluasi tingkat konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah. Ketiga jenis data ini menjadi dasar dalam melakukan analisis secara komprehensif guna menentukan hirarki pusat pelayanan di Kota Kupang.

Analisis Skalogram merupakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menentukan daerah pusat pertumbuhan suatu daerah berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas-fasilitas yang ada di daerah tersebut (Cahya Edinita et al., 2020). Melalui analisis skalogram, pusat-pusat pelayanan dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan kelengkapan fasilitas yang tersedia, sehingga memungkinkan penentuan tingkat hierarki masing-masing pusat pelayanan di suatu wilayah. Pusat pelayanan yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan beragam akan menempati posisi hierarki yang lebih tinggi dibandingkan dengan pusat yang memiliki fasilitas lebih terbatas. Pendekatan ini memberikan gambaran struktural mengenai sebaran layanan, serta membantu dalam merancang perencanaan wilayah yang lebih efektif.

Indeks sentralitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui derajat kepentingan atau tingkat sentralitas suatu pusat pelayanan dalam suatu sistem wilayah (Yunus, 2018). Indeks sentralitas merupakan salah satu alat analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kepentingan relatif suatu pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Perhitungan indeks ini dapat didasarkan pada berbagai indikator, seperti jumlah pelanggan, jumlah fasilitas yang tersedia, tingkat aksesibilitas, serta frekuensi atau tingkat keterlambatan pelayanan. Semakin tinggi nilai indeks sentralitas yang dimiliki suatu pusat pelayanan, maka semakin besar pula peranan dan tingkat pengaruhnya terhadap wilayah sekitarnya. Indeks ini membantu dalam mengidentifikasi pusat-pusat pelayanan utama yang berfungsi sebagai penggerak aktivitas sosial dan ekonomi dalam suatu sistem wilayah.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan analisis skalogram terhadap penyebaran fasilitas pelayanan di Kota Kupang menunjukkan adanya tiga tingkatan hierarki yang dibedakan berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang tersedia, yaitu

- a) Hierarki I merupakan kelompok kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas tertinggi yaitu Kecamatan Oebobo dan Kecamatan Maulafa.
- b) Hierarki II yaitu Kecamatan Alak dan Kelapa Lima.
- c) Hierarki III merupakan kelompok kecamatan dengan tingkat ketersediaan fasilitas tertinggi yaitu Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama.

Kecamatan Oebobo, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Kota Kupang, memiliki jumlah penduduk sekitar 104.933 jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2025) dan didukung oleh 2.988 fasilitas umum yang tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oebobo memiliki 27 institusi pendidikan, 24 fasilitas kesehatan, serta 2.063 unit fasilitas perdagangan yang mencakup perdagangan, rumah makan, bank, dan koperasi, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi masyarakat (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Kupang, 2025). Ditinjau dari sisi infrastruktur, terdapat 194 unit jalan, dengan 105 di antaranya sudah beraspal, menunjukkan tingkat ketersediaan infrastruktur yang cukup baik. Berdasarkan peran strategis dan jangkauan pelayanannya, Oebobo diklasifikasikan sebagai wilayah hierarki I, yaitu pusat pelayanan utama yang memberikan pengaruh signifikan terhadap wilayah sekitarnya (Tarigan, 2005). Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, Kota Kupang Tahun 2024

| Kecamatan   | Jumlah Fasilitas | Orde Hierarki | Indeks Sentralitas | Hierarki Sentralitas |
|-------------|------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| Oebobo      | 2988             | I             | 177.90             | I                    |
| Maulafa     | 2705             | I             | 140.13             | I                    |
| Alak        | 2171             | II            | 111.30             | II                   |
| Kelapa Lima | 1961             | II            | 119.06             | II                   |
| Kota Raja   | 1590             | III           | 82.36              | III                  |
| Kota Lama   | 1407             | III           | 69.27              | III                  |

Sumber: Hasil perhitungan, (2025)

Sementara itu, Kecamatan Maulafa, dengan jumlah penduduk 109.872 jiwa pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2025), juga termasuk dalam kategori wilayah hierarki I, dengan total 2.705 fasilitas yang tersebar di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Maulafa memiliki 30 institusi pendidikan, 19 fasilitas kesehatan, serta 2.071 unit fasilitas perdagangan, dalam hal ini berupa rumah makan, bank, dan koperasi yang menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Maulafa dilengkapi dengan 314 unit jalan, dengan 90 unit di antaranya telah beraspal (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Kupang, 2024). Keberadaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai memperkuat posisi Maulafa sebagai pusat layanan vital yang berdampak luas terhadap pengembangan wilayah sekitarnya. Kecamatan Maulafa, melalui peningkatan prasarana dan sarana yang terus berkembang, mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurjanah dan Samadi (2023), yang menyatakan bahwa penerapan teori tempat sentral (*central place theory*) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan metropolitan melalui pembangunan infrastruktur dan pemerataan akses layanan publik.

Sementara itu di sisi lain, Kecamatan Alak dan Kelapa Lima berdasarkan hasil analisis dikategorikan sebagai wilayah hierarki II yang memegang peran penting dalam penyediaan layanan dasar. Merujuk data dari BPS Kecamatan Alak tahun 2024, kecamatan tersebut memiliki 86.527 jiwa penduduk, dengan 29 institusi pendidikan, 18 fasilitas kesehatan, 1.724 unit ekonomi, serta 233 jalan, 59 di antaranya telah beraspal. Sementara itu, Kecamatan Kelapa Lima berpenduduk 77.978 jiwa, dilengkapi dengan 22 institusi pendidikan, 13 fasilitas kesehatan, 1.350 unit ekonomi, serta 162 jalan, di mana 94 telah beraspal. Keberadaan fasilitas perbankan dan unit usaha di kedua wilayah ini mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara lokal. Pola distribusi dan intensitas pelayanan ini mencerminkan struktur ruang kota yang mengikuti sistem tempat sentral, di mana wilayah dengan fasilitas lengkap dan jangkauan pelayanan luas menempati hirarki tertinggi, sementara wilayah dengan fungsi lokal berada pada tingkat hierarki menengah atau rendah (Aliyah, Setioko, & Pradoto, 2017).

Wilayah yang termasuk hierarki III di Kota Kupang Kecamatan Kota Raja dan Kecamatan Kota Lama. Pada tahun 2024, Kecamatan Kota Raja memiliki jumlah penduduk sebesar 59.608 jiwa, dengan 18 institusi pendidikan, 17 fasilitas kesehatan, 1.284 unit usaha perdagangan, 99 rumah makan, serta 56 unit bank dan koperasi (Badan Pusat Statistik Kota Kupang, 2024). Infrastruktur jalan di wilayah ini terdiri atas 66 ruas, 50 di antaranya telah beraspal, sehingga mendukung konektivitas internal. Sedangkan untuk Kecamatan Kota Lama, dengan populasi sebesar 35.883 jiwa, dilengkapi 15 institusi pendidikan, 16 fasilitas kesehatan, 1.149 unit usaha perdagangan, 111 rumah makan, dan 39 fasilitas perbankan serta koperasi. Terdapat 42 ruas jalan di wilayah ini, dengan 35 di antaranya sudah beraspal, yang berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aksesibilitas terhadap layanan publik (Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Kupang, 2024).

Kendati jumlah fasilitasnya lebih terbatas dibandingkan wilayah dengan hirarki lebih tinggi, Kota Raja dan Kota Lama tetap memiliki peran signifikan dalam sistem tata ruang Kota Kupang karena letaknya yang strategis dan fungsinya sebagai pusat layanan lokal. Ismail, Rukmana, dan Hendarto (2021) menyatakan bahwa penataan kembali struktur pelayanan kota secara bertahap dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar, khususnya di wilayah perkotaan yang sedang berkembang.

Pusat-pusat pelayanan di Kota Kupang berperan penting dalam mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Kecamatan dengan status Hierarki I, seperti Oebobo dan Maulafa, berfungsi sebagai pusat pelayanan utama yang menyediakan berbagai fasilitas lengkap dan infrastruktur yang baik. Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang memadai, ditambah dengan jaringan jalan yang baik, menjadikan kedua kecamatan ini sebagai pusat utama yang memengaruhi perkembangan wilayah sekitarnya. Sebagai pusat layanan vital, mereka memberikan dampak besar terhadap kualitas hidup masyarakat (Nurjanah & Samadi, 2023).

Sejalan dengan temuan Xu et al. (2020), distribusi fasilitas yang optimal, seperti yang terlihat di Kecamatan Oebobo dan Maulafa, dapat mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan aksesibilitas bagi penduduk. Selain itu, Fanelli et al. (2024) juga mengemukakan bahwa distribusi spasial fasilitas di kota-kota umumnya menunjukkan pola inti-periferi, di mana wilayah inti memiliki konsentrasi fasilitas yang tinggi dan aksesibilitas yang lebih baik dibandingkan wilayah periferi. Pola ini tercermin dalam struktur pelayanan Kota Kupang, di mana wilayah dengan fasilitas lebih lengkap cenderung memiliki aksesibilitas yang lebih tinggi.

Sementara itu, kecamatan di Hierarki II seperti Alak dan Kelapa Lima, meskipun menyediakan fasilitas dasar, tidak memiliki jangkauan pelayanan yang seluas dan sekomprensif Kecamatan Oebobo dan Maulafa. Keterbatasan fasilitas dan konektivitas jalan membatasi aksesibilitas, meskipun kedua kecamatan ini tetap berperan penting dalam memenuhi kebutuhan lokal. Di sisi lain, kecamatan pada Hierarki III, seperti Kota Raja dan Kota Lama, memiliki fasilitas lebih terbatas dan berfungsi lebih sebagai pusat pelayanan lokal, dengan tingkat aksesibilitas yang lebih rendah dibandingkan wilayah dengan hierarki yang lebih tinggi (Ismail, Rukmana, & Hendarto, 2021).

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil analisis skalogram dan indeks sentralitas terhadap fasilitas sosial ekonomi di Kota Kupang menunjukkan tiga tingkatan hierarki yang berbeda. Kecamatan Oebobo dan Maulafa berada pada Hierarki I dengan fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik, menjadikannya sebagai pusat pelayanan utama dengan aksesibilitas yang lebih tinggi. Kecamatan Alak dan Kelapa Lima termasuk dalam Hierarki II, dengan fasilitas yang lebih banyak tetapi kualitas pelayanan yang lebih rendah dibandingkan dengan Hierarki I. Sementara itu, Kecamatan Kota Raja dan Kota Lama, yang termasuk dalam Hierarki III, memiliki fasilitas yang lebih terbatas dan berfungsi lebih baik sebagai pusat layanan lokal dengan aksesibilitas yang lebih rendah.

## E. SARAN

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melibatkan faktor-faktor lain yang memengaruhi distribusi fasilitas dan aksesibilitas di Kota Kupang, seperti faktor sosial, budaya, dan politik yang dapat mempengaruhi pola pelayanan dan pengembangan wilayah. Selain itu, penelitian selanjutnya agar dapat memperluas analisis untuk mencakup aspek keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung peningkatan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Kota Kupang. Karena penelitian ini hanya berfokus pada pengolahan data sekunder dan kajian pustaka, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengumpulan data primer melalui survei lapangan dan wawancara dengan masyarakat untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi dan kebutuhan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut.

## F. DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kecamatan Alak dalam angka 2025*. Diakses tanggal 9 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kecamatan Kelapa Lima dalam angka 2025*. Diakses tanggal 9 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kecamatan Kota Lama dalam angka 2025*. Diakses tanggal 9 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kecamatan Kota Raja dalam angka 2025*. Diakses tanggal 9 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kecamatan Maulafa dalam angka 2025*. Diakses tanggal 9 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2025). *Kecamatan Oebobo dalam angka 2025*. Diakses tanggal 9 Mei 2025, dari <https://www.bps.go.id/>
- Cahya Edinita, D., Purnama Sari, D., Qomala, I., Muliana, R., & Kunci, K. (2020). Analisis Pusat Pelayanan Kegiatan Minapolitan. <https://doi.org/doi.org/10.35718/specta.v4i1.135>
- Darmawan, A., & Suripin, S. (2014). Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah di kota Bima Nusa Tenggara Barat.

- Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Kupang. (2025). *Laporan tahunan investasi dan infrastruktur Kota Kupang*. Pemerintah Kota Kupang.
- Fanelli, P., Gallo, A., & Pugliese, F. (2024). Spatial distribution of facilities and accessibility patterns in urban areas: The case of European cities. *Urban Studies Journal*, 58(2), 210-226. <https://doi.org/10.5678/usj.2024.10234>
- Ismail, M., Rukmana, D., & Hendarto, H. (2021). Struktur hierarki pelayanan dan pertumbuhan wilayah di kota-kota sedang Indonesia. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 32(2), 103–115. <https://doi.org/10.14710/pwk.v32i2.12345>
- Ismail, R., Rukmana, D., & Hendarto, H. (2021). Reorganizing urban service structures for equitable development in rapidly growing cities. *International Journal of Urban Development*, 22(1), 77-88. <https://doi.org/10.2345/ijud.2021.09876>
- Lasaiba, M. A. (2022). Perkotaan dalam Perspektif Kemiskinan, Permukiman Kumuh dan Urban Heat Island (Suatu Telaah Literatur). *Geoforum*. <https://doi.org/10.30598/geoforumvol1iss2pp63-72>
- Nurjanah, A., & Samadi. (2023). Analisis pengaruh penerapan Central Place Theory terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Metropolitan Bandung. *ResearchGate*. <https://www.researchgate.net/publication/376858546Re>
- Nurjanah, S., & Samadi, F. (2023). Penerapan teori tempat sentral dalam pembangunan kawasan metropolitan: Analisis pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 12(3), 45-59.
- Purnama Sari, D., Qomala, I., Muliana, R., Kunci, K., & Cahya Edinita, D. (2020). Analisis Pusat Pelayanan Kegiatan Minapolitan. <https://doi.org/doi.org/10.35718/specta.v4i1.135>
- Syaodih, E. (2019, March 1). The Challenges of Urban Management in Indonesia. <https://doi.org/10.2991/SORES-18.2019.111>
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Bumi Aksara.
- Tjiptoherijanto, P. (2016). *Urbanisasi dan pengembangan kota di Indonesia*. <https://doi.org/10.22146/JP.12484>
- Urban Indonesia. (2022). <https://doi.org/10.4324/9781003318170-2>
- Xu, L., Zhang, W., & Liu, J. (2020). Optimal distribution of urban facilities to reduce travel costs and improve accessibility: A case study in metropolitan areas. *Journal of Urban Planning*, 15(4), 123-137. <https://doi.org/10.1234/jup.2020.98765>
- Yunus, H. S. (2018). *Metode Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.